

EVALUASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KELURAHAN TAMANAN KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ratih Widayanti

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: ratihwdyanti@gmail.com

Hj Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : hjwenirosdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPTS) ini berdasarkan Peraturan Menteri Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 adalah program fasilitasi pemerintah dengan memberikan sejumlah dana untuk pembangunan atau perbaikan rumah tidak layak huni dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara . Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPTS) Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini terdiri dari Staf Bappeda Kabupaten Tulungagung, Staf Dinas PU BMCK Kabupaten Tulungagung, Staf Kelurahan Tamanan dan kelompok sasaran penerima bantuan BSPTS Di Kelurahan Tamanan. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan program BSPTS di Kelurahan Tamanan dari enam indikator model evaluasi menurut William N Dunn yaitu: 1) efektivitas, belum dikatakan efektif karena selama pelaksanaan terdapat kendala terkait penyaluran bantuan dan juga karena masih banyaknya masyarakat miskin yang belum menerima bantuan karena keterbatasan kuota. 2) efisiensi, sudah terpenuhi untuk bantuan bahan material dengan sumber dana yang jelas berasal dari APBN tetapi untuk biaya tukang belum memenuhi sehingga hal ini dapat menghambat ketercapaian program dan juga terkait kerjasama antar sumber daya manusia yang turut serta dalam proses pembangunan. 3) kecukupan, belum maksimal karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh kelompok sasaran mengingat bantuan yang didapat dari pemerintah berupa bahan material 4) pemerataan, untuk besaran bantuan disalurkan merata sesuai dengan kebutuhan . Akan tetapi masih terdapat masalah dalam proses bangunan dan juga masih banyaknya masyarakat miskin yang belum menerima bantuan karena syarat yang diberikan pemerintah. 5) responsivitas, dengan adanya program bspts ini masyarakat merasa sangat terbantu dan juga dapat meningkatkan rasa solidaritas antar tetangga dan saudara disekitar kelompok sasaran. Serta respon positif yang ditunjukkan oleh penerima bantuan. 6) ketepatan, ketidaktepatan sasaran yang terjadi karena adanya penolakan oleh kelompok sasaran karena keterbatasan dana . Dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPTS) di Kelurahan Tamanan masih terdapat kendala, maka saran peneliti adalah : 1) Meninjau kembali syarat dan ketentuan calon penerima bantuan khususnya terkait status kepemilikan tanah. 2) Persyaratan untuk penerima bantuan yang sekiranya memberatkan atau menyulitkan seharusnya dihilangkan. 3) Bantuan yang diberikan hendaknya tidak hanya meliputi bahan bangunan saja melainkan juga meliputi biaya tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. 4) Desain rumah seluruh penerima bantuan disamakan agar tidak terjadi kekurangan dan dapat mencukupi kriteria rumah sehat. 5) Diperlukan adanya pengawasan dari pelaksana mulai dari proses sosialisasi program hingga proses pelaksanaan agar tidak terjadi kesalahan atau miskomunikasi antara pihak pelaksana dan pihak penerima bantuan.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Stimulan Perumahan

Abstact

The Self-Help Housing Stimulation Program (BSPS) is based on Minister of Public Works and People's Housing Regulation no. 14 Year 2011 is a government facilitation program by providing some funds for the construction or repair of uninhabitable homes with funds sourced from the State Revenue Budget. This study aims to describe the evaluation of the Self-Helping Housing Stimulus Program (BSPS) in Tamanan Village Tulungagung District Tulungagung District. The research type used is descriptive with quantitative approach. The subject of this research consisted of staff of Bappeda of Tulungagung Regency, staff of PU BMCK Office of Tulungagung Regency, Tamanan Village Staff and beneficiary group of BSPS in Tamanan Village. Data collecting technique consisted of observation, interview and documentation . Data analysis used in the form of data collection, data reduction and conclusion. The results of the study show that the program of BSPS in Tamanan Urban Village from six indicators of evaluation model according to William N Dunn are: 1) effectiveness, not yet effective because during implementation there are constraints related to the distribution of aid and also because there are still many poor people who have not received assistance due to quota limitations. 2) efficiency, has been fulfilled for material assistance with funding source which obviously comes from APBN but for the expense of artisans have not fulfilled so that this can hinder the achievement of program and also related cooperation between human resources participating in development process. 3) sufficiency, not maximal due to limited funds owned by the target group considering assistance obtained from the government in the form of materials 4) leveling, for the amount of aid distributed evenly in accordance with the needs. But there are still problems in the building process and also the many poor people who have not received assistance due to government requirements. 5) responsiveness, with the existence of this bsp program, the community feels very helpful and can also increase the sense of solidarity between neighbors and relatives around the target group. As well as the positive response shown by the beneficiaries. 6) the accuracy, inaccuracy of targets that occur due to the rejection by the target group due to limited funds. It can be concluded that the Self-Helping Housing Stimulation Program (BSPS) program in Tamanan Village is still constrained, so the researcher's suggestion is: 1) Reviewing the terms and conditions of potential beneficiaries especially related to land ownership status. 2) Requirements for recipients of assistance in the case of incriminating or complicating should be omitted. 3) Assistance should not only cover building materials but also cover labor costs as required. 4) The design of the houses of all beneficiaries is equated to avoid shortages and sufficient criteria for a healthy house. 5) There is a need for supervision from the implementer from the program socialization process until the implementation process in order to avoid errors or miscommunication between the implementing parties and the beneficiaries.

Keywords: Evaluation, Housing Stimulant Program

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari suatu situasi ke situasi lainnya yang di nilai lebih baik . Konsep pembangunan mempunyai kaitan erat dengan nilai, strategi, dan indikator yang sekaligus menjadi domain setiap negara berkembang. Pembangunan merupakan salah satu wujud nyata pemerintah dalam mewujudkan dan mensejahterakan masyarakat (Sudjana. 2006). Dalam hal ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemberdayaan untuk masyarakat miskin. Kebutuhan utama masyarakat selain sandang dan pangan adalah papan/rumah yang layak, mengingat bahwa rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) , bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kenyataannya untuk mewujudkan rumah yang layak huni itu sendiri bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mengingat masih banyaknya masyarakat Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan dan hidup sangat kekurangan. Sehingga pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak oleh masyarakat berpenghasilan rendah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, selain itu pembangunan rumah layak huni membutuhkan biaya besar sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat miskin (Hawiyah, Siti.2016). Oleh karena itu masih banyak masyarakat Indonesia yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah belum memiliki rumah yang layak huni, aman, sehat dan nyaman

Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga terbentuklah suatu kebijakan .Kebijakan publik sendiri terbentuk ketika dalam kehidupan masyarakat terdapat permasalahan yang kompleks sehingga menuntut adanya sebuah tindakan sebagai sesuatu yang dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi (Wahab,Solichin Abdul.2014). Oleh karena itu Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Perumahan Rakyat yang pada tahun 2014 telah berganti nama menjadi Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu Kabupaten di Indonesia yang menerima bantuan adalah Kabupaten Tulungagung memperoleh jumlah bantuan keseluruhan 3800 unit atau 3,24 persen dari total keseluruhan penerima bantuan di Provinsi Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 28.425 Milyar yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Tulungagung.(Sumber:<http://www.pu.go.id/m/main/view/1127pp>).

Sedangkan untuk tahun 2016 Kabupaten Tulungagung mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya dengan total 932 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Tulungagung.(sumber:<http://www.tulungagung.go.id/index.php/show/772-932-warga-dapat-bantuan-bsps-2016>)

Dalam pelaksanaan selama empat tahun terakhir Program BSPS Di Kabupaten Tulungagung khususnya di Kelurahan Tamanan masih kurang merata karena masih banyaknya masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan karena terbentur biaya untuk membayar tukang . Selain itu terdapat permasalahan terkait status kepemilikan tanah sehingga masyarakat miskin di Kelurahan Tamanan tidak mendapatkan bantuan yang mana seharusnya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak harusnya di prioritaskan.Dalam pelaksanaan BSPS di Kelurahan Tamanan masih banyak terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan pedoman yang telah diberikan pemerintah. Salah satunya adalah proses pembangunan yang melebihi batas waktu yang ditentukan. Selain itu permasalahan yang timbul adalah bahan bangunan yang datang berkualitas jelek.

Oleh karena itu maka perlunya dilakukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap program yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini penulis melakukan evaluasi dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William N Dunn (2003:429) merumuskan enam kriteria dalam evaluasi

kebijakanyaitu:yaitu:efektivitas,efisiensi,perataan,kecukupan,resposivitas,danketepatan.Alasanpeneliti menggunakan kriteria evaluasi William N Dunn dalam penelitian ini adalah karena teori yang ada sangat relevan dengan kondisi yang ada di lapangan khususnya digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya . Berdasarkan uraian masalah dan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ **Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.**”

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan evaluasi dengan menggunakan kriteria evaluasi William N Dunn yaitu: efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Alasan peneliti menggunakan kriteria evaluasi William N Dunn Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Evaluasi program BSPS adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model Milles dan Huberman (Sugiyono, 2014:338) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung berlatarbelakang dari masih banyaknya masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian terkait dengan Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung yang dianalisis menggunakan kriteria evaluasi menurut William N Dunn (2003:429) yaitu : efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas dan ketepatan adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Pengukuran kriteria efektivitas berhubungan dengan apakah alternatif kebijakan yang digunakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan . Alternatif kebijakan yang memberikan bantuan secara tepat yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan melalui pemberian informasi terkait program kebijakan, tujuan dari program, serta manfaat dari pelaksanaan program. Adapun yang menjadi latar belakang dari program BSPS ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Tulungagung yang memiliki jumlah rumah tidak

layak huni sebanyak 12.801 unit rumah tidak layak huni . Jumlah tersebut didapat dari database tahun 2012-2015. Sebagai alternatif kebijakan pengentasan kemiskinan dengan pemberian bantuan material langsung untuk proses pembangunan rumah. Berdasarkan maksud dari tujuan program BSPS menurut tim pelaksana program BSPS di Indonesia khususnya di Kabupaten Tulungagung, tujuan dari program BSPS adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Kualitas hidup yang diharapkan adalah dengan kondisi rumah dan lingkungan yang bersih, sehat , asri , tidak ada atap bocor dan dinding terbebas dari hewan yang mudah masuk ke dalam rumah. Selain itu program BSPS merupakan program pengentasan kemiskinan yang di khususkan untuk masyarakat miskin yang memiliki penghasilan rendah.

Sebagai program yang di khususkan untuk masyarakat miskin, program BSPS Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dikatakan kurang efektif karena masih terdapat banyak rumah warga miskin yang belum tersentuh bantuan hal ini dikarenakan karena persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah secara tidak langsung membebani penerima bantuan karena mereka harus menyediakan uang lebih atau tabungan untuk biaya tukang . Selain itu juga masih banyaknya masyarakat miskin di Kelurahan Tamanan yang belum menerima bantuan karena keterbatasan kuota yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk itu diperlukan peran pemerintah agar tercapainya tujuan program

2. Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi pelaksanaan program BSPS ini berdasarkan sumber dana dan juga besar bantuan, tim pelaksana serta bagaimana pihak terkait menjalankan program. Tingkat efisiensi unuk masyarakat penerima bantuan diukur berdasarkan tingkat kepuasan serta dampak yang dirasakan setelah berjalannya program ini (William N Dunn (2003:429). Sumber dana dari program BSPS ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Besaran bantuan ditentukan berdasarkan kondisi rumah kelompok sasaran sehingga besaran bantuan yang diperoleh tidak sama antara penerima satu dengan lainnya. Untuk jumlah bahan bangunan yang diberikan pemerintah sudah cukup baik tetapi untuk biaya tukang sendiri belum terpenuhi karena penerima bantuan harus menanggung sendiri biaya tukang

dengan menggunakan uang pribadi mereka. Karena bantuan ini sendiri diberikan bukan dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk bahan material langsung.

Selain sumber dana yang jelas, juga sumber daya manusia (SDM) sebagai tim pelaksana telah terkoordinasi dengan dibentuknya tim panitia pembangunan di setiap RW Di Kelurahan Tamanan. Sumber daya manusia sebagai tim pelaksana dibentuk untuk mendukung berjalannya program BSPS yang didukung oleh SKPD-SKPD terkait sebagai tim panitia yang mengkoordinir, mengawasi, melaksanakan serta mengevaluasi berjalannya program agar sesuai dengan tujuan dan dapat tepat sasaran. Kriteria keberhasilan program BSPS ini juga tidak lepas dari strategi yang diterapkan oleh para pelaksana program. Strategi yang diterapkan salah satunya adalah melalui sosialisasi tentang program BSPS kepada masyarakat miskin di setiap kelurahan. Strategi lainnya adalah menjalin koordinasi dengan baik antara pelaksana program BSPS. Tugas dan tanggungjawab dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Strategi dan mekanisme yang diterapkan mampu melaksanakan program dengan baik.

3. Kecukupan

Indikator kecukupan menguatkan antara hubungan alternatif kebijakan dan hasil yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Kriteria kecukupan pada program BSPS tidak hanya pada bagaimana pencapaian sasaran dengan biaya tertentu, melainkan juga dilihat dari bagaimana strategi dan mekanisme yang diterapkan mampu melaksanakan program dengan baik. Keterbatasan dana bantuan ini membuat masyarakat penerima bantuan harus mengeluarkan uang lebih untuk bisa menyelesaikan pembangunan rumah. Karena waktu pengerjaan rumah adalah 60 hari setelah pencairan bantuan tahap II dan jika dihitung biaya tukang selama 60 hari masyarakat harus mengeluarkan banyak biaya.

Ketercapaian indikator kecukupan dalam memecahkan masalah selain dipengaruhi keterbatasan dana juga dipengaruhi oleh hubungan kerjasama antara saudara dan para tetangga penerima bantuan. Perlunya kerjasama ini dilakukan mengingat bantuan BSPS ini hanya berupa material bangunan sehingga untuk biaya tukang sendiri masyarakat memanfaatkan bantuan dari para tetangga dan sanak saudara untuk meminimalisir biaya.

4. Perataan

Indikator perataan merupakan keadilan yang sama diberikan pada sasaran kebijakan. Perataan disini merujuk pada hubungan akibat dan usaha kelompok masyarakat. Pada indikator perataan dalam pelaksanaan program BSPS Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung terdapat permasalahan yang muncul seperti jumlah bahan material yang datang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya dan juga pada proses pembangunan rumah. Selain itu masih banyaknya masyarakat miskin yang memiliki penghasilan rendah di Kelurahan Tamanan belum menerima bantuan karena terkendala syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketercapaian program bps pada indikator perataan di Kelurahan Tamanan masih belum efektif. Sehingga perlunya dilakukan evaluasi oleh pemerintah agar program dapat berjalan sesuai tujuan.

5. Responsivitas

Penelitian yang dilakukan di lapangan diketahui bahwa kebanyakan masyarakat merespon dengan baik adanya program BSPS Di Kelurahan Tamanan, namun tidak jarang ada masyarakat yang menolak karena masalah keterbatasan dana yang dianggap tidak mencukupi kebutuhan. Sejuah ini respon masyarakat Di Kelurahan Tamanan masih bersifat positif dan diharapkan agar program ini dapat berjalan terus namun diharapkan ada penambahan jumlah dana atau untuk pencairannya dilakukan dengan uang tunai agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri. Meskipun adanya keterbatasan dana namun masyarakat sangat antusias dan terlihat dari aksi gotong royong yang dilakukan para tetangga untuk membantu proses pembangunan sehingga menambah keakraban dan kesolidaritasan antar warga.

6) Ketepatan

Indikator evaluasi mengenai ketepatan merujuk pada apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai untuk kelompok sasaran. Kriteria penerima Bantuan BSPS Sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013. Selain melihat dari kondisi rumah juga dilihat dari mata pencaharian penerima bantuan apakah termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki pendapatan dibawah 2 juta rupiah. Jika kondisi rumah tidak layak huni tetapi pendapatan mencukupi maka penerima bantuan diprioritaskan untuk warga yang benar-benar memiliki penghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni sesuai kriteria. Selain indikator evaluasi ketepatan sasaran, indikator ketepatan dalam proses pembangunan rumah pada program BSPS Di Kelurahan Tamanan merupakan tolak ukur untuk mencapai tingkat efektivitas berjalannya program. Proses pelaksanaannya dipantau langsung oleh Tim

panitia dan Tim pendamping masyarakat Kelurahan Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Tulungagung.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung diketahui bahwa program BSPS ini merupakan program dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan dan upaya untuk mensejahterakan masyarakat miskin agar bisa memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Sebuah evaluasi diperlukan dalam suatu program untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat membuahkan hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. (Widodo, Joko, 2007). Penelitian ini dijabarkan menggunakan model evaluasi menurut William N Dunn yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Dilihat dari indikator efektivitas, pelaksanaan program BSPS ini masih belum efektif karena selain masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan juga terdapat keluhan dari kelompok sasaran terkait dana bantuan dan juga kualitas bahan material yang diberikan. Selain itu juga selama program ini berjalan empat tahun tetapi belum dapat berjalan maksimal untuk mengurangi angka kemiskinan karena masih banyaknya masyarakat miskin di Kelurahan Tamanan yang belum menerima bantuan karena keterbatasan kuota yang ditentukan oleh pemerintah.

Pada indikator efisiensi, sumber dana program BSPS ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Republik Indonesia. Pada sumber daya manusia sebagai tim pelaksana dan dibentuk tim panitia untuk mengkoordinir, mengawasi, melaksanakan serta mengevaluasi program BSPS agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Terkait dengan dana bantuan yang diberikan sudah cukup baik yaitu berupa bahan material namun untuk biaya tukang sendiri masih belum terpenuhi karena masyarakat yang menerima bantuan harus memakai uang pribadi untuk biaya tersebut. Mengingat program bps ini memberikan bantuan berupa bahan material bangunan. Selain sumber dana yang jelas, sumber daya manusia (SDM) sebagai tim pelaksana telah terkoordinasi dengan dibentuknya tim panitia pembangunan di tiap RW Di Kelurahan Tamanan.

Pada indikator kecukupan, program BSPS dianggap masih belum maksimal karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh kelompok sasaran. Disini kelompok sasaran harus menyiapkan uang pribadi untuk ongkos tukang dan keperluan lain karena program yang diberikan semua berupa bahan material. Selain itu bahan material yang diberikan oleh pemerintah dirasakan masih kurang karena masih terdapat rumah penerima bantuan yang bahan material materialnya tidak bisa mengcover seluruh bagian rumah sehingga bagian belakan rumah sebagian masih berasal dari gedeg.

Pada indikator pemerataan kelompok sasaran mendapatkan dana bantuan disesuaikan dengan kondisi rumah sehingga satu sama lain jumlahnya tidak sama. Akan tetapi masih terdapat kelompok sasaran yang menerima bantuan material tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Selain itu juga masih banyaknya masyarakat miskin yang belum menerima bantuan karena terkendala syarat yang ada yaitu penerima program bantuan didahulukan yang memiliki tabungan.

Dilihat dari indikator responsivitas yang mengarah kepada kepuasan kebutuhan mendapat tanggapan yang cukup baik. Sejauh ini respon masyarakat Kelurahan Tamanan masih bersifat positif dan diharapkan agar program ini dapat terus berjalan dan ada tambahan dana bantuan. Meskipun terdapat keterbatasan dana, masyarakat sekitar antusias dan terlihat dari aksi gotong royong para tetangga untuk membantu proses pembangunan sehingga program ini meningkatkan keakraban, kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi antar masyarakat. Responsivitas dari panitia sendiri demi untuk mendukung ketercapaian tujuan sangat mendukung dan menampung segala keluhan, kritik dan saran dari kelompok sasaran.

Pada indikator ketepatan ditemui adanya ketidaksesuaian sasaran penerima bantuan. Masih adanya warga miskin di Kelurahan Tamanan yang tidak mendapatkan bantuan. Ketidaktepatan sasaran terjadi karena adanya penolakan oleh kelompok sasaran atas bantuan program BSPS ini dikarenakan tidak adanya biaya tambahan yang diperlukan untuk proses pembangunan rumah. Sejauh ini selama pelaksanaan program masih terdapat warga miskin di Kelurahan Tamanan yang tidak mendapatkan bantuan. Selain itu ketidaktepatan sasaran dari bantuan BSPS ini karena tidak adanya biaya tambahan untuk proses pembangunan.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, peneliti memiliki beberapa saran agar pelaksanaan Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung

Kabupaten Tulungagung , penulis memeberikan saran dari hasil identifikasi beberapa kelemahan . Berikut ini adalah saran untuk program BSPS :

- 1) Meninjau kembali syarat dan ketentuan calon penerima bantuan khususnya syarat terkait status kepemilikan tanah
- 2) Persyaratan untuk penerima bantuan yang sekiranya memberatkan atau menyulitkan seharusnya dihilangkan.
- 3) Bantuan yang diberikan hendaknya tidak hanya meliputi bahan bangunan saja melainkan juga meliputi biaya tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan
- 4) Desain rumah seluruh penerima bantuan disamakan agar tidak terjadi kekurangan dan dapat mencukupi kriteria rumah sehat
- 5) Diperlukan adanya pengawasan dari pelaksana mulai dari proses sosialisasi program hingga proses pelaksanaan agar tidak terjadi kesalahan atau miskomunikasi antara pihak pelaksana dan pihak penerima bantuan.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
- b. Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. selaku dosen pembimbing
- c. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. dan M.Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. selaku dosen penguji.
- d. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- e. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Sudjana. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung.

William N.Dunn.2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* . Edisi Kedua.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Wahab,Solichin Abdul.2014. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model –Model Implementasi Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Widodo,Joko.2007.*Analisis Konsep Dan Aplikasi : Analisis Proses*. Malang: Banya Media Publishing.

Hawiyah, Siti.2016. *Evaluasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014*. Tanjung Pinang : Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Undang-Undang Dasar No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) , bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Kriteria Penerima Bantuan

<http://www.pu.go.id/m/main/view/1127pp>).

<http://www.tulungagung.go.id/index.php/show/772-932-warga-dapat-bantuan-bsps-2016>)